

## ABSTRAK

Tindak pidana penipuan dan penggelapan diberitakan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan paling banyak dilaporkan ke pihak kepolisian. Maraknya kasus penipuan dan penggelapan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan bentuk atau modus operandi tindak pidana penipuan menjadi beragam dan sulit untuk dilacak. Disamping itu pula, faktor kebutuhan ekonomi dan gaya hidup konsumtif menjadi faktor yang utama para pelaku menjalankan aksinya. Pergantian kerugian materiil yang diderita oleh korban merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak-hak korban yang selama ini dikesampingkan dalam sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara dengan adanya kesepakatan perdamaian pada kasus penipuan dan penggelapan merupakan salah satu upaya korban untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku, namun prosesnya belum diatur dengan jelas pada tingkat penyidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah dan Progresivitas penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder sehingga metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sebagai pisau analisis digunakan konsep *restorative justice*, teori sistem hukum dan teori hukum progresif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa proses penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Progresivitas penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berhubungan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana yang bertitik tolak pada dua komponen basis hukum yaitu peraturan (*rules*) dan perilaku (*behavior*). Komponen peraturan nampak dari beberapa aturan hukum tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan yang telah diatur dalam peraturan kepolisian, disamping itu pula komponen perilaku anggota Polri terlihat dalam penerimaan laporan yang pro-rakyat dan penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana.

**Kata kunci : progresivitas, tindak pidana penipuan dan penggelapan, *restorative justice*.**

## **ABSTRACT**

*Fraud and embezzlement are reported to be crimes that are very unsettling to the public and are mostly reported to the police. The rise of fraud and embezzlement cases that occur in Indonesia is caused by many factors, including the advancement of science and technology that causes the forms or modus operandi of criminal acts of fraud to be diverse and difficult to trace. Besides that, the factors of economic need and consumptive lifestyle are the main factors that the actors carry out their actions. Substitution of material losses suffered by the victim is a form of fulfillment of the rights of victims who have been ruled out in the criminal justice system. Settlement of cases with the existence of a peace agreement on fraud and embezzlement is one of the victims' efforts to obtain compensation from the perpetrators, but the process has not been clearly regulated at the investigation level.*

*The approach method used is empirical juridical with descriptive analytical research specifications. The data used in the form of primary data and secondary data so that the method of data collection through field studies and literature studies. Data analysis method used is qualitative analysis. As a knife of analysis, the concepts of restorative justice, legal system theory and progressive legal theory are used.*

*The results showed that the process of investigating criminal acts of fraud and embezzlement at the General Criminal Investigation Directorate of the East Java Regional Police was in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and the National Police Chief Regulation Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations. The progress in handling fraud and embezzlement in the East Java Regional Police Criminal Investigation Directorate is related to the application of restorative justice in investigating criminal acts that starts with two components of the legal basis, namely rules and behavior. The regulatory component appears from a number of legal rules regarding the application of restorative justice in investigations that have been regulated in police regulations, in addition to that the behavioral component of Polri members is seen in the reception of pro-people reports and the application of restorative justice in criminal investigations.*

**Keywords:** *fraud and embezzlement, investigation, progressive, restorative justice*